

SALINAN



WALI KOTA PAGAR ALAM

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 24 TAHUN
2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN
ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terdapat Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 24 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3).
 8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 02);
 9. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 25);
 10. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi perubahan pada Lampiran Keputusan Wali Kota Padgar Alam Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 masing-masing unit kerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 1 September 2025
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ŁUDI OLIANSYAH

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam
 Nomor : 211 tahun 2025
 Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 24
 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
 Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Sekretariat Daerah
 Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025

Tanggal : 1 September 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
	SEKRETARIAT DAERAH					Rp35.499.491.109
1.	BAGIAN UMUM	KEPALA BAGIAN UMUM	PROGRAM PENUNJANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp28.799.150.109
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp31.666.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp23.101.000
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp24.755.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp24.437.500
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp24.875.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp8.379.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp746.400.000
					Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp154.921.500
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Rp47.902.500
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp39.000.000

			Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah	Rp629.630.453
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya	Rp337.150.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Rp508.377.700
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp596.304.500
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp885.807.140
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp436.727.500
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp216.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp4.697.662.000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Rp1.184.787.000
				Pengadaan Mebel	Rp1.000.641.321
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.049.614.250
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp74.000.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp6.357.600.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp582.902.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Rp3.752.755.400
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp170.240.000
				Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp859.242.000

					Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp436.400.000
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp176.018.349
					Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp222.500.000
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp30.000.000
					Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp399.999.996
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp1.210.345.000
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp672.700.000
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp988.308.000
2.	BAGIAN ORGANISASI	KEPALA BAGIAN ORGANISASI				Rp1.008.584.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp367.858.000
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp219.223.000
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp180.704.000
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp115.354.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp125.445.000
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN				Rp915.507.000
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan Potokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitasi Keprotokolan	Rp821.001.000
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp40.448.000
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp54.058.000
4.	BAGIAN PEMERINTAHAN	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN				Rp767.369.000

			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp69.558.500
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp203.742.000
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp451.372.500
				Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp42.696.000
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				Rp1.827.944.500
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Rp1.491.845.000
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kinerja Sosial	Rp287.499.500
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp48.600.000
6.	BAGIAN HUKUM	KEPALA BAGIAN HUKUM				Rp657.021.500
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Rp230.806.000
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp260.218.000
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp165.997.500
7.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				Rp303.206.000
			PROGRAM PEREKONOMIAAN DAN PEMBANGUNAN	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp20.058.000
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp60.245.500
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp42.522.000
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp16.889.500
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp50.854.000

					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp50.207.000
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp26.326.000
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp36.104.000
8.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PROGRAM PEREKONOMIAAN DAN PEMBANGUNAN	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Rp1.220.709.000
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp642.715.000
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp354.411.500
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp223.582.500

WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUNI OLIANSYAH